



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755, www.komisiyudisial.go.id

Nomor: 52/Siaran Pers/AL/LI.04.01/12/2021

UNTUK DITERBITKAN SEGERA

Jakarta, 21 Desember 2021

KY Terima 87 Laporan Sengketa Tanah dan 11 Laporan Kekerasan Perempuan dan Anak

Jakarta (Komisi Yudisial) - Carut marut sengketa kasus agraria menarik perhatian banyak pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY). Sesuai kewenangan yang diamanatkan konstitusi, KY berkomitmen memberikan perhatian terhadap kasus-kasus sengketa pertanahan, terutama kasus yang diduga melibatkan mafia tanah. Ketua Bidang Pengawasan Hakim KY Sukma Violetta mengungkapkan bahwa KY menerima 87 laporan masyarakat dan 51 surat tembusan terkait perkara pertanahan pada Januari-November 2021.

"Dari jumlah tersebut, ada 65 permohonan pemantauan persidangan kasus pertanahan. Sementara 17 laporan menunggu kelengkapan, 3 laporan telah dianalisis, 1 laporan memasuki pemeriksaan pendahuluan, dan 1 laporan telah dilakukan sidang panel," ungkap Sukma.

Sesuai dengan kewenangannya, KY menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. KY melakukan pemantauan terhadap sidang sengketa tanah seperti penguasaan tanah tanpa hak, sengketa waris, sertifikat ganda dan perkara yang diduga terkait praktek mafia tanah.

"KY telah melakukan 31 pemantauan sidang sengketa tanah sebagai upaya untuk mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak yang berperkara. KY tidak akan masuk ke substansi perkara, karena KY mendorong independensi hakim dalam memutus perkara," jelas Sukma.

Sedangkan 31 permohonan lainnya tidak dapat dipantau KY dan 3 permohonan masih proses analisis.

Sukma menambahkan bahwa KY telah menjalin sinergisitas dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN terkait laporan masyarakat dan permohonan pemantauan sengketa tanah ini. Bahkan, secara khusus, Kementerian ATR/BPN telah memohonkan 13 sengketa tanah untuk dipantau oleh KY. Sebanyak 12 kasus telah dipantau dan 1 kasus tidak dipantau karena sudah putus.

Awasi Sidang Kekerasan Perempuan dan Anak

Selain kasus sengketa tanah, KY juga menaruh perhatian terhadap sidang perkara kekerasan perempuan dan anak. Sepanjang Januari hingga November 2021, KY menerima 11 laporan masyarakat terhadap perilaku hakim yang menyidangkan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak dan 3 surat tembusan. Sebanyak 6 permohonan dimintakan publik untuk dilakukan pemantauan persidangan.

"Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak contohnya terkait penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga," urai Sukma.

Dari 6 permohonan pemantauan persidangan semuanya dilakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh KY.

"KY berharap ada keterlibatan publik secara aktif dengan cara membuat laporan atau permohonan pemantauan atas perkara pertanahan serta perkara terkait perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak," pungkash Sukma.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Juru Bicara KY
Miko Ginting
Hp: 087822626362

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY
Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,
(021) 3906189
www.komisijudisial.go.id
email: humas@komisijudisial.go.id



KY TERIMA 87 LAPORAN SENGKETA TANAH

87

Laporan Masyarakat

51

Tembusan

65
permohonan
pemantauan
persidangan
kasus
pertanahan17
laporan
menunggu
kelengkapan1
laporan
memasuki
pemeriksaan
pendahuluan3
laporan telah
dianalisis1
laporan telah
dilakukan sidang
panel

HASIL PERMOHONAN PEMANTAUAN



31

Dipantau KY

31

Tidak dapat
dipantau KY

3

Proses
Analisis

Sinergisitas dengan berbagai pihak

Kementerian ATR/BPN telah memohonkan 13 sengketa tanah untuk dipantau oleh KY. Sebanyak 12 kasus akan dipantau dan 1 kasus tidak dipantau karena sudah putus.



KY AWASI SIDANG KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

11 KY menerima 11 laporan masyarakat

surat tembusan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak **3**

6 - 6 permohonan pemantauan, - semuanya telah dilakukan pemantauan oleh KY

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak contohnya terkait penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga

